

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam hal mendukung upaya pemerintah untuk melakukan swasembada pangan dan pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat, pemerintah ingin memfasilitasi prasarana dan sarana pertanian untuk para petani Indonesia, antara lain subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani Indonesia yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Pusat pengelola pupuk bersubsidi wilayah Jawa Timur dikelola oleh PETROKIMIA GRESIK dengan membawahi beberapa distributor dengan struktur pengelolaan distributor membawahi beberapa Kios Resmi, dan Kios Resmi membawahi beberapa Kelompok Tani, lalu didistribusikan ke petani. Dikarenakan pupuk bersubsidi termasuk barang dalam pengawasan, maka dalam pengawasannya diawasi oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan) yang dibantu oleh TNI dan POLRI, serta Dinas Pertanian (Yudhoyono, 2015).

Dalam hal ini pengelolaan pupuk subsidi oleh pusat, pengelolaan subsidi oleh distributor dan pengelolaan subsidi oleh kios resmi di atur oleh Dinas Pertanian Ponorogo. Dengan pembagian pupuk berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan harga yang diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Dalam hal ini maka akan mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi sehingga pupuk subsidi akan tersampaikan dengan baik kepada petani Indonesia.

Salah satu instrumen diciptakan pemerintah untuk mengkondisikan transparansi penyaluran pupuk bersubsidi terhadap petani adalah kartu tani. Kebijakan penebusan pupuk dengan menggunakan kartu tani dimulai sejak tahun 2017. Hal tersebut sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka akan dilakukan uji coba penerapan Kartu Tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di pengecer resmi, sehingga diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi para petani yang berhak menerimanya. Namun, faktanya masih banyak masalah yang terjadi sepanjang subsidi pupuk diberlakukan, seperti kelangkaan pupuk, penyelundupan pupuk ke luar negeri, lonjakan harga di atas HET, perembesan pupuk bersubsidi ke pasar nonsubsidi dan antar wilayah. Masalah lain yang ditimbulkan oleh kebijakan subsidi pupuk, yaitu: distribusi yang tidak adil dan tidak tepat sasaran, dualisme pasar, biaya subsidi yang lebih besar dari manfaat (Susila, 2015) menyebutkan bahwa beberapa penyebab harga pupuk lebih tinggi dari HET adalah lemahnya pengawasan dan selisih antara kebutuhan pupuk di lapangan dengan alokasi.

Adanya kebijakan pemerintah ini alih alih sebagai sarana transparansi akan tetapi realitanya tidak bisa berjalan sesuai keadaan. Sasaran program transparansi kartu tani ini adalah petani yang notabe berusia lansia, mejadikanya enggan untuk mengikuti kemajuan jaman. Mereka yang sejak dini tumbuh dan berkembang tanpa tersentuh iptek lalu ketika tua langsung diberikan kebijakan seperti ini mengakibatkan kebijakan kartu tani ini dianggap menjadi sebuah hal yang dianggap menyulitkan para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Sedangkan pemerintah pusat enggan memberikan toleransi kepada para petani yang gaptek dan hanya memberikan aturan tanpa solusi. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2020 yaitu

terjadinya pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi hingga 55,80% di Kabupaten Ponorogo ini menimbulkan kepanikan dan dikhawatirkan menyulut kemarahan petani (Mesa, 2020). Kebijakan kebijakan pemerintah pusat tersebut membuat para petani yang dahulunya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sangatlah mudah hanya dengan menebus sejumlah uang nominal harga pupuk bersubsidi tersebut, kini harus melalui berbagai macam proses dan syarat administrasi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang dimana jumlahnya juga telah dipangkas lebih dari 50% jatah pertahunnya.

Kebijakan pemerintah pusat lambat taun semakin tidak masuk akal. mereka memberi kebijakan secara sepihak tanpa ada penjelasan, serta solusi secara langsung tentang apa penyebab sehingga terjadinya pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi dan bagaimana cara mengatasi kelangkaan pupuk atau alternatif lain yang bisa digunakan. Sedangkan kehadiran pupuk bersubsidi sangat diharapkan oleh seluruh petani Indonesia. Dengan ini penulis tertarik untuk meneliti secara langsung bagaimana dampak dari kebijakan pusat terhadap para petani masa kini , dan bagaimana cara Pemerintah kabupaten Ponorogo menyikapi atau membantu mengatasi apabila terjadi kelangkaan pupuk di kotanya,dan juga alternatif apa yang bisa digunakan untuk mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi akibat kebijakan pemerintah pusat yang terjadi secara sepihak dikotanya.Serta apa saja harapan petani terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk tahun tahun kedepanya. Penulis memilih untuk menerapkan penelitian di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo karena lokasinya yang mudah dijangkau serta termasuk dalam kriteria desa petani yang butuh perhatian khusus guna menghadapi kebijakan pemerintah pusat.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan mendasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah pusat tentang tata kelola pupuk bersubsidi?
2. Bagaimana dampak kebijakan Pemerintah pusat tentang tata kelola pupuk bersubsidi terhadap petani ?
3. Bagaimana kondisi dan permasalahan yang ditemukan di desa Tatung terkait kelola pupuk bersubsidi?
4. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang tata kelola pupuk bersubsidi.
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah tentang tata kelola pupuk bersubsidi terhadap petani dengan mengambil kasus di wilayah Kecamatan Balong kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui bagaimanaystrategi yang dilakukan oleh para petani dalam menanggulangi kelangkaanypupukybersubsidi. y

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kebijakan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan pupuk bersubsidi di Indonesia serta dampaknya secara nyata terhadap para petani, salah satunya di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi tentang kebijakan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan pupuk bersubsidi di Indonesia serta dampaknya secara nyata terhadap para petani, salah satunya di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sekaligus referensi apabila berminat untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut ataupun penelitian sejenis.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah atau yang dikenal dengan istilah kebijakan public, secara umum pengertiannya adalah kebijakan publik sebagai arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu (Friedrich, 2010). Kebijakan Publik atau Kebijakan pemerintah juga memiliki berbagai tujuan meliputi :

- a. Untuk menciptakan suatu ketertiban di lingkungan masyarakat.
- b. Untuk melindungi sebuah hak-hak pada masyarakat.
- c. Untuk menciptakan suatu ketenteraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat.
- d. Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan di masyarakat.

2. Pupuk Bersubsidi

Pasal 1 Peraturan Presiden No.77/2005 menjelaskan bahwa, Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan

Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri pertanian.

F. LANDASAN TEORI

1. Sejarah Diberlakukannya Kebijakan Subsidi Harga Pupuk dan Nilai APBN untuk Subsidi Pupuk.

Pertambahan penduduk meningkatnya Indonesia yang pesat berakibat kebutuhan pangan terutama beras meningkatnya. Awalnya Indonesia sangat tergantung pada beras impor karena produksi dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan yang sangat besar. Tetapi dengan berjalannya waktu, mengingat ketahanan pangan merupakan komponen penting dari ketahanan nasional dan melihat potensi sumberdaya pertanian Indonesia yang sangat besar namun belum digarap secara maksimal, pemerintah berketetapan untuk mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan akan beras impor ini dengan harapan suatu saat akan tercapai swasembada pangan (Hafsah dan Sudaryanto, 2004).

Program peningkatan produksi padi dilaksanakan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi produksi. Dalam rangka memacu produksi inilah peranan dari pupuk sangat strategis. Kebutuhan pupuk awalnya pun masih harus dipenuhi dari impor, tetapi karena mengingat gas alam sebagai bahan baku utama pembuatan pupuk tersedia cukup berlimpah di Indonesia, pemerintah memutuskan membangun sendiri pabrik pupuk. Sejarah perpupukan nasional dimulai dengan berdirinya Pupuk Sriwijaya (Pusri) yang dibangun dengan dana rampasan perang Jepang dan mulai berproduksi pada tahun 1963, diikuti oleh Petrokimia Gresik pada 1972, Pupuk Kujang pada 1978, Asean Aceh

Fertilizer (AAF, proyek patungan antara negara-negara ASEAN) pada 1983, serta Pupuk Kaltim (PKT) dan Pupuk Iskandar Muda pada 1984.

Kebijakan subsidi pupuk dibuat oleh Menteri Pertanian periode 2000 – 2004.

Alasannya, pada saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter, serta krisis pangan. Saat itu Indonesia mengimpor beras sekitar 5 juta ton dan menginginkan impor berkurang bahkan swasembada. Satu-satunya jalan agar tidak impor beras produksi dalam negeri harus meningkat. Jika produksi dalam negeri ingin ditingkatkan, maka petani harus bergairah dalam memproduksi. Petani akan bergairah jika mendapatkan keuntungan.

Di sisi lain, pada saat itu Indonesia menandatangani *Letter of Intent* (LoI) dengan IMF yang salah satu poinnya adalah menghilangkan semua hambatan impor. Selain itu, di pasar dunia terjadi excess supply pangan yang mengakibatkan harga pangan dunia rendah sekali sehingga mengimpor sangat menguntungkan bagi Indonesia. Indonesia meyakinkan IMF, bila tidak menerapkan kebijakan proteksi melalui tarif masuk, maka ketahanan pangan Indonesia akan bermasalah dalam jangka panjang bila mengimpor selama terus menerus, sedangkan dalam jangka pendek tidak menjadi masalah. Seperti yang diketahui harga beras internasional yang rendah disebabkan banyaknya subsidi yang diberikan oleh negara produsennya, sedangkan Indonesia dilarang mensubsidi dan membuat tarif masuk. Dan IMF pun dapat Indonesia yakinkan.

Ternyata tarif impor saja tidak cukup karena harga dalam negeri sudah tinggi.

Indonesia juga menerapkan harga pembelian pemerintah (HPP). HPP berdasarkan harga internasional yang rendah ditambah tarif masuk sehingga HPP relatif sama dengan harga beras dalam negeri yang tinggi. Dengan ditetapkan HPP itu pun ternyata petani juga belum cukup bergairah. Sehingga Indonesia memutuskan

untuk memberikan subsidi pupuk agar mengurangi biaya produksinya. Biaya produksinya dikurangi dan harga panen dinaikkan melalui HPP sehingga margin petani menjadi lebih besar. Itulah sejarahnya Indonesia membuat subsidi pupuk.

Revitalisasi sistem agribisnis merupakan program mendesak guna menstabilkan pertumbuhan produksi beras yang sangat strategis dalam pemantapan swasembada pangan, peningkatan pendapatan petani, dan dinamisasi ekonomi desa. Untuk itu kebijakan pangan nasional perlu direkonstruksi secara komprehensif. Pemerintah perlu memikirkan paket kebijakan pengembangan produksi pangan utama secara komprehensif, dan tidak hanya terbatas pada harga dasar gabah saja.

2. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (2016), kebijakan adalah prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu serta kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang

dihadapi.

3. Kebijakan Subsidi Pupuk

Dinamika kebijakan subsidi pupuk dapat dibedakan menjadi empat tahapan yaitu:

- a. Kebijakan subsidi sebelum era pasar bebas,
- b. Kebijakan penghapusan subsidi memasuki pasar bebas,
- c. Kebijakan pemberian kembali subsidi pupuk, dan
- d. Kebijakan subsidi pupuk era pasar bebas.

Dinamika kebijakan dengan tingkat intensitas yang relatif tinggi mengindikasikan ketidakpuasan berbagai pihak terkait terhadap rumusan kebijakan, implementasi, dan dampaknya bagi petani dan pembangunan pertanian. Bahasan ini akan membahas secara ringkas kinerja kebijakan tersebut dan mengajukan pola introduksi distribusi pupuk ke depan (Sudaryanto, et.al., 2015).

Secara ringkas kinerja subsidi pupuk pada periode sebelumnya dapat dinyatakan (Sudaryanto, et.al., 2015) sebagai berikut:

- a. Kinerja subsidi sebelum era pasar bebas: mampu mendorong tercapainya swasembada beras; pengurangan subsidi perlu dikompensasi dengan peningkatan harga produksi; dan peningkatan harga pupuk tidak berpengaruh terhadap penggunaannya, karena proporsinya dalam biaya usaha tani masih relatif kecil.
- b. Penghapusan subsidi memasuki era pasar bebas: penghapusan monopoli telah mengefisienkan distribusi pupuk; subsidi pupuk dinilai lebih adil dibandingkan dengan subsidi gas untuk pabrik pupuk.

c. Kebijakan pemberian kembali subsidi pupuk: format ROSP (Rencana Operasional Subsidi Pupuk) memungkinkan pabrik pupuk memperoleh subsidi langsung dari pemerintah; subsidi untuk pabrik pupuk, dan bukan untuk petani; struktur subsidi hanya menguntungkan pabrik pupuk.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk pada era pasar bebas ini dinilai tidak efektif untuk membantu petani. Hal ini dibuktikan oleh beberapa fakta berikut ini:

“Harga pupuk di tingkat petani jauh di atas harga HET; dan Pasokan pupuk di tingkat petani seringkali langka karena konsekuensi dari dualisme pasar, ekspor pupuk, dan keterbatasan penyaluran oleh pabrik pupuk.”

Fenomena langka pasok dan lonjak harga pupuk merupakan kasus menyimpang yang tidak semestinya terjadi. Produksi pupuk urea dalam negeri jauh melebihi kebutuhan dan distribusinya dikendalikan pemerintah.

Berdasarkan fenomena di atas PSE-KP secara tegas menyarankan “kembalikan subsidi pupuk kepada petani” (Simatupang, 2014).

4. Evaluasi Kritis Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Indonesia

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan HET serta ditetapkan di penyalur resmi Lini IV. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/ desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi sektor pertanian atau sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak.

Sasaran pupuk bersubsidi adalah petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam per-keluarga

petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 hektar.

Program pemberian pupuk bersubsidi sudah dimulai sejak tahun 1970-an, tujuannya kebijakan ini adalah untuk meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya pupuk tersedia dengan harga yang terjangkau. Terdapat argumentasi bahwa, pertama pemanfaatan teknologi pupuk sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Kedua, petani Indonesia umumnya tidak bisa memanfaatkan teknologi pupuk ini karena kurang mampu membeli sesuai dengan harga pasar. Sehingga pemerintah Indonesia yang berkepentingan dalam peningkatan produktifitas hasil pangan demi ketahanan pangan Nasional, kemudian memilih opsi memberikan subsidi harga pupuk untuk petani.

Meminjam teori Richard Rose (2010) sebagai seorang pakar kebijakan ia menyarankan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi konsekuensinya yang akibatnya dirasakan betul oleh rakyat dan bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu, tapi menimbang untung ruginya. Kebijakan pupuk bersubsidi awalnya bertujuan untuk membantu petani memperoleh pupuk dengan harga subsidi, namun realitasnya petani sulit memperoleh pupuk di daerah, bahkan ada petani karena semakin kesalnya, berapapun harga pupuk siap kami beli, namun pupuk yang akan dibeli tersebut tidak ada.

5. Apa arti Dampak

Istilah dampak mengacu pada “setiap perubahan yang terjadi pada situasi atau konteks”. Menilai dampak adalah mendokumentasikan perubahan yang terjadi serta semua faktor yang berkontribusi dalam mencapai perubahan itu.

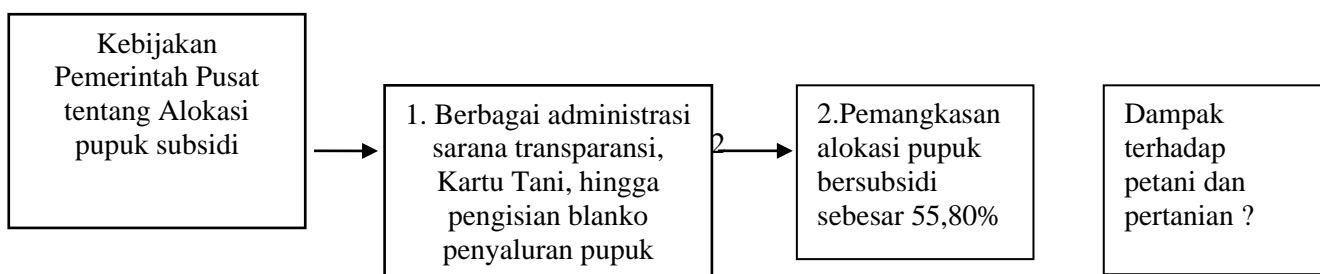
Istilah ‘dampak’ tidak hanya untuk hal-hal yang ‘baik’. Menilai dampak berarti melihat dampak yang diinginkan dan yang tidak diinginkan – positif dan negatif – dan apa saja yang menyebabkan hal tersebut. Perlu diperhatikan bahwa seringkali sulit untuk membuktikan bahwa video Anda yang memberi dampak. Faktanya, sebagian besar perubahan pada situasi atau konteks tidak secara langsung disebabkan oleh inisiatif video Anda. Inisiatif Anda mungkin saja berkontribusi pada dampak (atau bahkan tidak sama sekali).

Saran kami, Anda menilai *kontribusi* Anda pada suatu proyek atau gerakan dengan melihat berapa besar pengaruh inisiatif Anda dan apa efeknya. Sikap rendah hati diperlukan untuk menilainya, begitu pula dengan kesediaan untuk mengakui dan menghormati bahwa kontribusi Anda bersifat melayani di dalam sebuah kerja bersama menuju sebuah tujuan yang lebih besar.

G. Kerangka Berpikir

Bagan 1.1

Kerangka Pikir Penelitian





(Sumber: disesuaikan dengan penelitian)

Dalam kerangka pikir penelitian di atas digambarkan bahwa penelitian ini menganalisis Dampak dari Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengatur tentang Tata Kelola alokasi pupuk bersubsidi terhadap para petani di Indonesia salah satunya di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah merupakan suatu rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu variabel yang menjadi pokok penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kelompok

Dampak kebijakan pemerintah pusat tentang alokasi pupuk subsidi terhadap petani khususnya di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

2. Pengumpulan Data

- a. Wawancara kepada Penyuluh Pertanian Lapangan Dinas Pertanian Kecamatan Balong.
- b. Data Demografi penduduk dari Balai Desa Tatung Kecamatan Balong
- c. Wawancara terhadap Petani, dan Ketua Kelompok Tani

3. Metode pengamatan yang akan digunakan yaitu melihat hasil wawancara dari berbagai macam pihak penyalur maupun penerima pupuk bersubsidi. Bertujuan untuk mengetahui pendapat masing masing dari pihak lembaga manapun yang akan terkena dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat.

Definisi Operasional Variabel

| No | Variabel | Definisi | Alat ukur | Hasil ukur | Skala ukur |
|----|--|---|-----------|--|------------|
| 1. | Dampak kebijakan pemerintah pusat tentang alokasi pupuk subsidi terhadap petani khususnya di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo | Suatu kejadian dimana terjadi nya dampak entah positif maupun negatif karena adanya aturan atau kebijakan dari pemerintah yang tak pandang hulu | Wawancara | 1. Positif, karena dianggap bisa menambah transparansi data penyaluran pupuk bersubsidi sehingga meminimalisir penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi. 2. Negatif, Karena kebijakan pemerintah secara sepihak tanpa pandang hulu atau sasaranya. Di mana banyak petani yang notabene lansia dan gagap teknologi. | Ordinal |

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna (data yang sebenarnya, serta data yang pasti yang mengandung nilai dibalik data yang tampak). Dalam penelitian bentuk deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala,

peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif pada saat penelitian berlangsung cenderung memusatkan perhatian pada masalah aktual.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada obyek yang sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purpose* dan *snowbal*, teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti memilih melakukan penelitian ini di wilayah Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik melakukan penelitian di desa tersebut dikarenakan mayoritas petani menanam tembakau pada saat musim kemarau, sehingga sering terjadi penggunaan pupuk yang tidak sesuai RDKK atau jatah alokasi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dimana hal tersebut memicu terjadinya kekurangan pupuk di wilayah tersebut serta kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani.

3. Sumber Data

Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sumber data primer adalah Format data penduduk dari Kantor Balai Desa Tatung, Balai Pelatihan Pertanian Balong Ponorogo, distributor UD Sugih Waras, Kelompok Tani Desa Tatung. Sumber data sekunder adalah data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Desa Tatung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi. Disini peneliti akan menggabungkan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukan observasi guna mendapatkan data terkait keadaan yang sebenarnya di lapangan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan melakukan evaluasi. Sehingga, observasi penting dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi, kebudayaan, keadaan masyarakat serta kondisi lingkungan di wilayah Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Wawancara bertujuan untuk menemukan atau mengerti permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Peneliti perlu mendengarkan dalam proses wawancara secara teliti dan cermat serta

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data deskriptif terkait rencana definitif kebutuhan kelompok tani, di Dinas Pertanian dan UD Sugih Waras selaku distributor.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pencatatan data sekunder tentang peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, audio (rekaman), maupun karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan yang berkaitan dengan penyaluran, pengelolaan pupuk bersubsidi di wilayah Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Dokumen adalah peninggalan tertulis mengenai berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu relatif belum terlalu lama. Maksud dari peninggalan itu dapat berupa arsip-arsip dan buku-buku, sehingga sering disamakan dengan studi literatur atau studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dalam mencari dan menyusun data dari hasil observasi yang telah didapat, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis, dengan mengkategorikan data yang diorganisasikan, kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, melakukan seleksi data yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

(Sugiyono, 2017) Dalam penelitian kualitatif selama di lapangan dilakukan proses analisis data. Dalam proses analisis data dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya pengumpulan data dan berada dalam periode tertentu setelah selesainya pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono,

2017) mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif aktivitas dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability* (Sugiyono, 2017).